

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MENUJU DESA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA: *A SCOPING REVIEW***

(Skripsi)

Oleh

**SABILA ZAKIYAH
NPM 1916041061**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MENUJU DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA : A *SCOPING REVIEW*

Oleh

SABILA ZAKIYAH

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis implementasi dan *output Smart Village* dalam meningkatkan pelayanan publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia, serta faktor yang menjadi kendala dan solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *scoping review* dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil dari 27 artikel yang dilakukan *review* menunjukkan secara keseluruhan program *Smart Village* menunjukkan hasil yang beragam mulai dari model, aktor pelaksana dan kolaborasi, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, transformasi digital, sampai kesiapan desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Keberhasilan implementasi program ini masih belum merata di semua wilayah. Adapun *output* yang dihasilkan yaitu, digitalisasi layanan publik dan pengembangan *website* desa, pemberdayaan UMKM dan *digital marketing*, pelatihan literasi digital, *content creation*, dan pengembangan kapasitas masyarakat, promosi pariwisata desa di media sosial dan platform digital, serta pendekatan ramah lingkungan dan pengelolaan wisata yang berbasis alam. Kemudian, faktor yang menjadi kendala dalam implementasi program *smart village* di antaranya masih terdapat desa yang belum memiliki SOP dalam pelaksanaan *smart village*, akses internet yang belum memadai, pemahaman baik masyarakat maupun aparatur desa yang masih kurang, ketersediaan sarana dan prasarana, dan pemanfaatan teknologi yang masih belum optimal. Sementara solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu komunikasi yang efektif dalam penerapan kebijakan, memperkuat kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur teknologi, penerapan sistem informasi yang terintegrasi, serta pembuatan SOP Pelayanan.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, *Smart Village*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SMART VILLAGE PROGRAM IN IMPROVING PUBLIC SERVICES TOWARDS INFORMATION TECHNOLOGY-BASED VILLAGES IN INDONESIA : A SCOPING REVIEW

By

SABILA ZAKIYAH

This research aims to map and analyze the implementation and output of Smart Villages in improving public services towards information technology-based villages in Indonesia, as well as the factors that are obstacles and solutions. This study uses a qualitative approach with a scoping review method and data collection techniques in the form of literature studies. The results of the 27 articles reviewed show that the overall Smart Village program shows diverse results ranging from models, implementing actors and collaboration, communication, resources, disposition, bureaucratic structure, digital transformation, to village readiness to improve the quality of public services in the village. The success of the implementation of this program is still uneven in all regions. The outputs produced are, digitization of public services and village website development, empowerment of MSMEs and digital marketing, digital literacy training, content creation, and community capacity building, promotion of village tourism on social media and digital platforms, as well as environmentally friendly approaches and nature-based tourism management. Then, factors that are obstacles in the implementation of the smart village program include there are still villages that do not have SOPs in the implementation of smart villages, inadequate internet access, lack of understanding of both the community and village officials, the availability of facilities and infrastructure, and the use of technology that is still not optimal. Meanwhile, solutions that can be done to overcome these obstacles are effective communication in the implementation of policies, strengthening human resource capacity, developing technological infrastructure, implementing integrated information systems, and making service SOPs.

Keywords: Policy, Implementation, Smart Village

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MENUJU DESA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA: *A SCOPING REVIEW***

**Oleh
SABILA ZAKIYAH**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi

**:IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE*
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
MENUJU DESA BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DI INDONESIA: A SCOPING REVIEW**

Nama Mahasiswa

: Sabila Zakiyah

No. Pokok Mahasiswa: 1916041061

Jurusan

: Ilmu Administrasi Negara

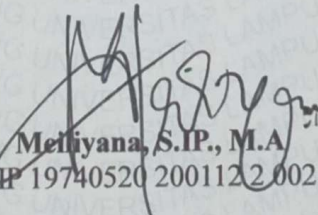
Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ita Prihantika, S.Sos., M.A
NIP. 19840630 201504 2 002

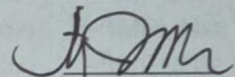
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meliyana, S.IP., M.A
NIP 19740520 2001122 002

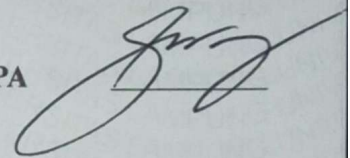
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

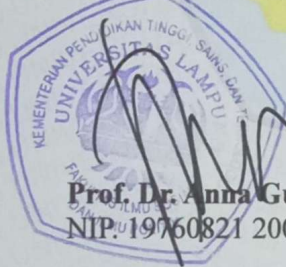
Ketua : Ita Prihantika, S.Sos., M.A



Penguji Utama : Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 02 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Sabila Zakiyah
NPM 1916041061

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sabila Zakiyah, dilahirkan di Tanggamus Provinsi Lampung pada tanggal 14 Januari 2001, merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Prakarya Haning Praja dan Ibu Lasmi. Penulis berasal dari Desa Argopeni, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Penulis mengawali pendidikan formal pada pendidikan Sekolah Dasar di MI Mathlaul Anwar Margodadi Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2013, dilanjutkan di MTs Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat yang diselesaikan pada tahun 2016, dan MA Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswa Universitas Lampung, penulis tergabung menjadi anggota di Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota Peminatan dan Bakat (MIKAT) pada tahun 2020/2021, kemudian juga tergabung sebagai staf kaderisasi pada Forum Studi Pengembangan Islam FISIP Universitas Lampung pada tahun 2021/2022 serta tergabung sebagai staf *Public Relation* pada *Social and Political English Club* (SPEC) FISIP Universitas Lampung pada tahun 2021/2022. Pada bulan Juni-Juli 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari serta penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Bandar Lampung pada subbidang Pengawasan Pajak pada Januari 2022.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan syukur atas segala karunia dan kasih sayang Allah SWT.

Aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Umi Abi, serta Kakak-kakak dan Adik-adikku Tersayang

Terimakasih atas ketulusan hati yang selalu mencintai, menyayangi, mengasihi, dan mendoakan serta memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Diriku Sendiri

Terimakasih telah berusaha untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Seluruh Dosen Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Terimakasih atas semua ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama berkuliah untuk bekal menghadapi dunia luar.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Rabb semesta alam yang tidak hentinya memberikan nikmat sehingga rasa syukur ini tiada henti tercurahkan kepada-Nya. Berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi *Smart Village* dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Menuju Desa Berbasis Teknologi dan Informasi di Indonesia: A Scoping Review”** guna mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dorongan, saran, motivasi, dan dukungan dari banyak orang telah memberikan inspirasi selama masa perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kekuatan, nikmat sehat jasmani dan rohani, serta telah membekali ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Teristimewa, kedua orang tua (Umi dan Abi), terimakasih telah memberikan segenap cinta, doa, dan dukungannya.
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan dosen Pembimbing Utama yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, pengarahan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini dengan sabar serta selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Ibu dosen pembimbing terbaik untuk saya. Semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan kepada Ibu.
4. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung. S.A.N., M.PA. selaku dosen pembahas yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, pengarahan, saran dan masukan kepada penulis. Bapak adalah sosok dosen yang sangat baik dan membangun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan kepada Bapak.
5. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staf dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.

9. Kakak-kakak (Mba Dila & Mas Hanif) dan adik-adik (Ayun & Ata) tersayang, terimakasih atas doa, semangat, dukungan dan bantuan kalian semua.
10. Miongi, kucing kesayangan penulis. Terimakasih telah setia menemani penulis sejak Oktober 2022, terimakasih karena selalu menghadirkan kegembiraan dan ketenangan di kala penat.
11. Sahabat tersayang sejak mulai kuliah, Tiara Audia, Fabima Rahmatin dan Iga Fredi Ani. Terimakasih telah kebersamaan penulis selama ini, mengajak dan menemani penulis untuk mengerjakan skripsi bersama, dan selalu menyemangati penulis untuk mengerjakan skripsi.
12. Sahabat sejak SMA, Tuhfatul Iftinan Robbani yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis walaupun secara jarak jauh dan selalu memberikan semangat, dukungan, dan dorongan untuk jangan menyerah.
13. Uncu, kakak favorit penulis, terimakasih sudah berusaha menyadarkan penulis untuk menyelesaikan studi dan memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis.
14. Kak Maul, kakak yang selalu bisa menenangkan penulis ketika sedang merasa panik selama proses skripsi walaupun dari jarak jauh. Terimakasih sudah meyakinkan penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman Granada, kakak-kakak tingkat, dan adik-adik tingkat yang selalu ramah menyapa dan memberikan dukungan di setiap momen penting penulis selama menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dan membntu penulis di seminar proposal, seminar hasil, dan sidang skripsi penulis.
16. Serta rekan-rekan lainnya yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, terimakasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi yang berguna bagi pembaca yang berminat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan di kemudian hari.

Bandar Lampung, 27 Mei 2025

Penulis
Sabila Zakiyah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	10
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.1.2. Tahap-tahap Kebijakan Publik	11
2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik	12
2.2. Tinjauan Tentang <i>Smart village</i>	17
2.2.1. Konsep <i>Smart village</i>	17
2.2.2. Dimensi <i>Smart village</i>	18
2.2.3. Elemen <i>Smart village</i>	19
2.2.4. Kebijakan Program <i>Smart village</i>	22
2.3. Peranan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik	24
2.4. Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.1. Desain Penelitian	28
3.2. Kriteria Kelayakan (<i>Eligibility Criteria</i>)	29
3.3. Sumber Informasi dan Strategi Pencarian.....	30

3.3.1. Sumber <i>Literature</i>	30
3.3.2. Strategi Pencarian	30
3.4. Seleksi Literatur	31
3.5. Item Data dan Proses Pengumpulan Data	34
3.6. Sintesis	34
3.7. Konsultasi	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Hasil	36
4.1.1. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas.....	36
4.1.2. <i>Charting Data</i>	38
4.1.3. <i>Mapping/Scoping</i>	51
4.2. Pembahasan.....	56
4.2.1. Implementasi Program <i>Smart Village</i> dalam Meningkatkan Pelayanan Publik	56
4.2.2. <i>Output</i> Program <i>Smart Village</i> dalam Meningkatkan Pelayanan Publik.....	91
4.2.3. Faktor Kendala dan Solusi dalam Keberhasilan Implementasi Program <i>Smart Village</i>	102
V. PENUTUP	115
5.1. Kesimpulan	115
5.2. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbedaan Konsep <i>Smart village</i> dengan <i>Smart city</i>	4
2. Dimensi <i>Smart village</i> Menurut Para Ahli	19
3. <i>Framework</i> PICO(S)	31
4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi.....	31
5. <i>Charting Data</i>	39
6. Karakteristik Umum Studi	51
7. Pemetaan Wilayah.....	52
8. Analisis Tematik.....	55
9. <i>Output Smart Village</i>	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Indeks Desa Membangun.....	2
2. Pemetaan <i>Smart village</i> (<i>Overlay Visualization</i> VOSViewer).....	5
3. Pemetaan <i>Smart village</i> (<i>Network Visualization</i> VOSViewer)	6
4. Kerangka Pikir	27
5. Diagram PRISMA <i>Flowchart</i>	33
6. PRISMA <i>Flowchart</i> Hasil Seleksi Studi Literatur	37

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

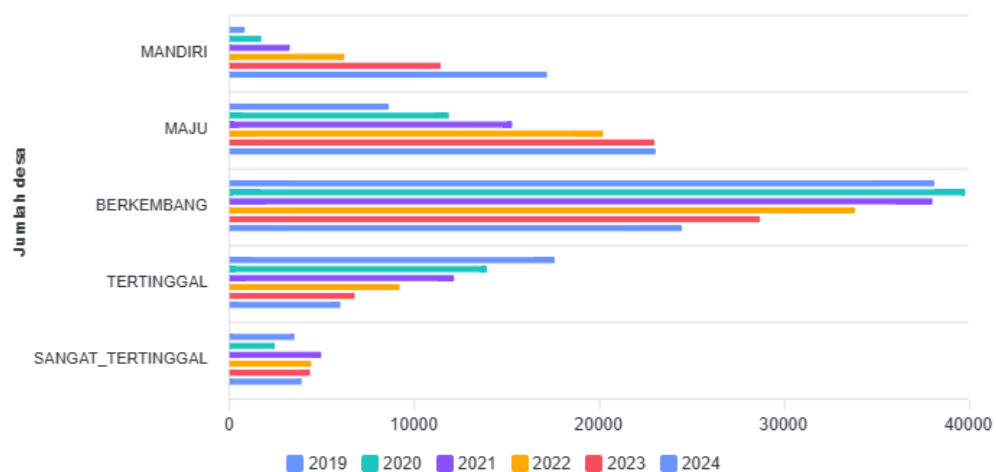
Perkembangan teknologi digital dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan. Hadirnya teknologi dan inovasi digital diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, membuat layanan publik bagi warga negara menjadi semakin efektif dan baik, yang mana hal ini tentunya memberikan arah khususnya bagi desa-desa untuk berkembang ke arah yang lebih maju (Bahirah, 2022).

Desa sebagai bagian dari negara sudah seharusnya mulai menerapkan teknologi informasi, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan pengelolaan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya bahkan juga dalam bidang pembangunan desa (Hikmah et.al., 2021). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu indikator dalam percepatan pembangunan desa. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat diharapkan akan memberikan perubahan-perubahan mendasar, terutama peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Dengan penerapan teknologi informasi, pemerintah desa dapat meningkatkan efisiensi administrasi publik, transparansi pengelolaan keuangan desa, dan memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang mereka butuhkan. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem informasi pengelolaan desa terpadu (SIMDES) yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik menjadi lebih baik (Kusroh, 2022).

Pemanfaatan teknologi informasi masih belum merata ke seluruh wilayah Indonesia terutama pada wilayah pedesaan, masih terdapat ketidaksetaraan kemampuan dalam menggunakan teknologi karena kurangnya akses, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pemahaman teknologi yang menjadi kendala utamanya. Kurangnya literasi digital menyebabkan terjadinya kesenjangan digital pada masyarakat pedesaan (Sukri dkk, 2022). Kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi di desa-desa membuat pelayanan publik di desa menjadi kurang efisien.

Pelayanan publik merupakan elemen fundamental dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik dapat diakses secara merata dan berkualitas, termasuk di wilayah pedesaan yang sering kali memiliki keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa di Indonesia adalah Indeks Desa Membangun (IDM). Bila mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM), masih banyak desa yang belum masuk ke dalam kategori desa yang maju maupun mandiri. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 1. Indeks Desa Membangun

(Sumber: kemendesa.go.id)

Berdasarkan gambar 1. dapat dilihat masih terdapat desa yang masuk dalam kategori sangat tertinggal dan tertinggal. Sampai tahun 2024 masih didominasi oleh desa dalam kategori yang masih berkembang dengan jumlah persentase 32.80% atau sebanyak 24.521 desa. Bahkan, masih terdapat 8.05% desa dalam kategori tertinggal dan 5.25% desa dalam kategori sangat tertinggal. Hal tersebut mencerminkan masih adanya tantangan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa dalam rangka pembangunan desa. Maka, berdasarkan landasan tersebut juga alasan peneliti ingin melihat bagaimana implementasi konsep *smart village* terhadap pelayanan di Indonesia. Apakah dengan penerapan konsep tersebut dari aspek pelayanan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari sistem pemerintahan terbawah yakni pemerintahan desa.

Di Indonesia, melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong perubahan sosial dan politik di wilayah pedesaan. Desa diharapkan terlibat aktif dalam pelayanan dasar, pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa harus memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi jika kita ingin Indonesia maju di masa depan. Untuk mencapai hal ini, pemerintah membuat suatu konsep *smart village* atau desa cerdas. *Smart village* atau desa cerdas merupakan pembangunan desa berbasis digital yang sejak 2016 mulai diperkenalkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang pada saat itu bernama LIPI, yang kemudian dalam implementasinya melibatkan beberapa kementerian seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehutanan (Adil *et.al*, 2023).

Konsep *smart village* merupakan turunan dari konsep *smart city*. Konsep *smart village* dipahami sebagai adanya potensi dorongan dari bawah ke atas, yaitu masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya. Berikut perbedaan antara *smart village* dengan *smart city*.

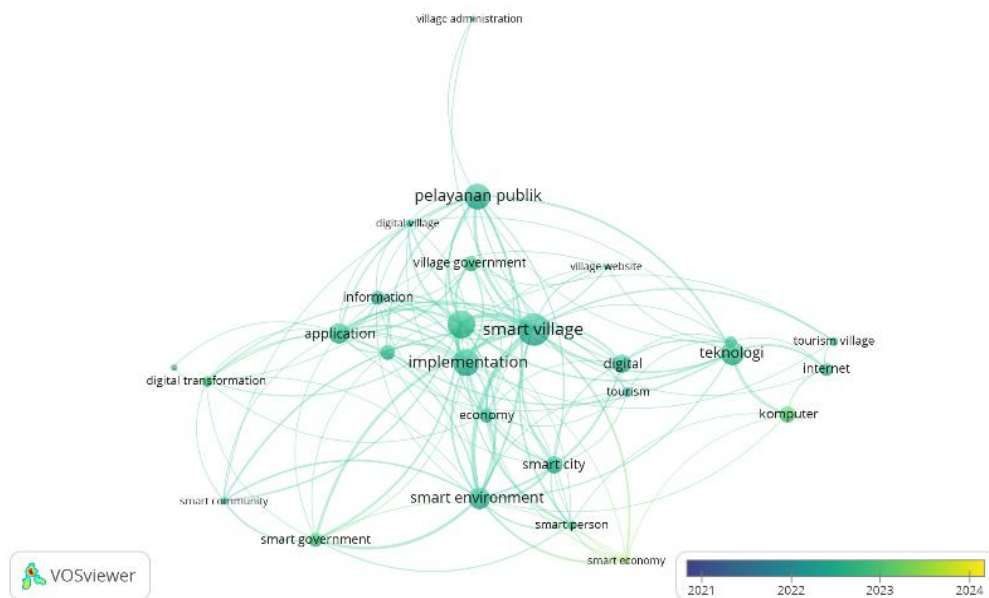
Tabel 1. Perbedaan Konsep *Smart village* dengan *Smart city*

Aspek	<i>Smart village</i>	<i>Smart city</i>
Pendekatan	<i>Bottom-Up</i>	<i>Top-Down</i>
Posisi Pemerintah	Fasilitator	Regulator
Posisi Masyarakat	<i>Customer</i>	<i>End-User</i>
Proses Pengembangan	Penguatan, kesadaran dan partisipasi terhadap elemen <i>smart village</i>	Kolektivitas dan integritas elemen dasar pengembangan <i>smart city</i>
Sasaran	Masyarakat menengah, miskin dan belum terberdayakan	Masyarakat dengan mobilitas tinggi
Keberhasilan	Pendekatan sosial-kultural menjadi basis utama. Adanya identifikasi yang valid terhadap berbagai nilai, karakter, norma dan masalah yang ada di masyarakat menjadi dasar keberhasilan <i>smart village</i>	Pendekatan teknologi menjadi basis utama di mana setiap pihak didorong untuk menggunakan teknologi informasi sebagai dasar keberhasilan <i>smart city</i>
Tujuan	Terwujudnya pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya teknologi informasi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, kemudahan akses informasi dan layanan dasar, sehingga menciptakan peningkatan kualitas hidup atas pemanfaatan teknologi masyarakat perkotaan

(Sumber: Herdiana, 2019)

Pengembangan *smart village* dalam prosesnya memerlukan analisis tentang berbagai nilai, karakter dan norma yang ada di masyarakat yang ditempatkan sebagai customer (pengguna) dari teknologi informasi. Masyarakat diberikan prioritas mengenai potensi dan karakter mana yang ingin dikembangkan melalui dukungan teknologi informasi, sehingga tercipta pemanfaatan teknologi yang tepat guna didasarkan kepada kebutuhan dan karakter masyarakat dalam kerangka *smart village*. Adanya identifikasi secara mendalam terhadap berbagai nilai, karakter dan norma yang ada, maka akan menentukan ukuran dari teknologi informasi yang akan dipergunakan dan pada akhirnya akan terjalin kesesuaian antara nilai, karakter, norma dan teknologi informasi dalam pengembangan *smart village* (Herdiana, 2019).

Secara umum desa dapat dikatakan sebagai desa cerdas apabila secara inovatif menggunakan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas hidup pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Herdiana, 2019). Konsep *smart village* sering diterangkan secara berbeda-beda, banyak desa yang menempatkan desanya sebagai desa cerdas tanpa ukuran elemen dan *guide teory smart village* yang sama. Pada praktiknya juga harus didukung dengan ukuran elemen *smart village* memadai. Hal tersebut juga didukung minimnya kajian yang mengangkat bagaimana konseptual pengembangan *smart village* secara mendasar (Herdiana, 2019).

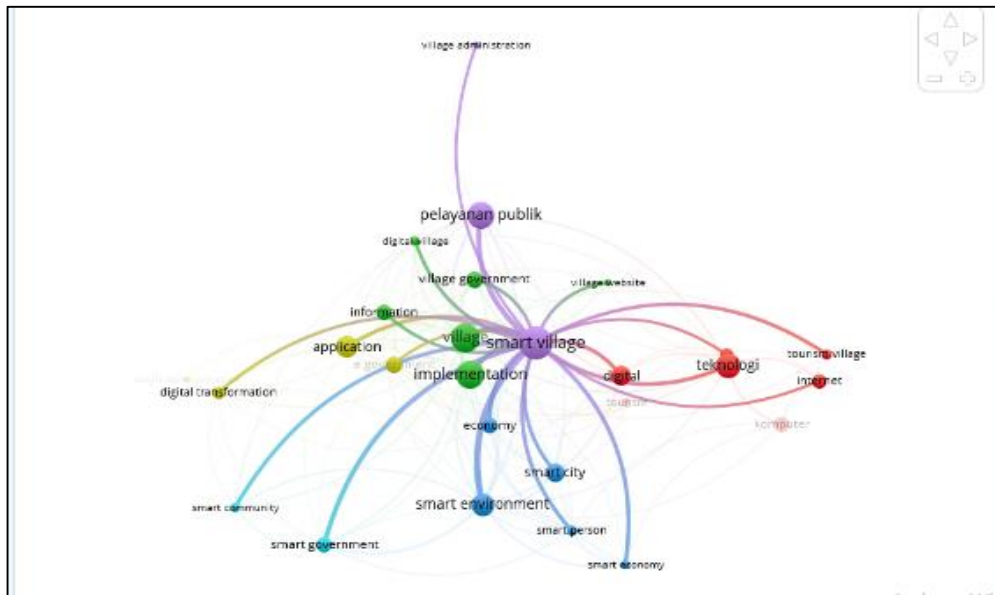


Gambar 2. Pemetaan *Smart village* (Overlay Visualization VOSViewer)

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024)

Peneliti melakukan pemetaan dari himpunan literatur melalui pencarian perangkat lunak *Publish or perish* (PoP) guna melihat fakta literatur berdasarkan jaring-jaring konsep *smart village* dengan kata kunci pencarian literatur meliputi “Implementasi AND *Smart village* AND *Smart government* AND *Smart Environment* AND *Smart community* AND Layanan Publik AND Digital” berdasarkan kutipan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil pemetaan jaringan berdasarkan kata kunci terkait pembahasan *smart village*,

dapat dilihat dari kata kunci *smart village* telah dilakukan dari tahun 2021 yang juga terhubung dengan kata kunci *smart government*, *smart environment* dan *smart community* sebagai 3 (tiga) elemen pelaksanaan dari *smart village* dan menandakan penelitian terkait program *smart village* dengan elemen pelaksanaannya telah banyak dibahas.



Gambar 3. Pemetaan *Smart village* (Network Visualization VOSViewer)

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024)

Hal ini juga ditandai dengan keterhubungan kata kunci *smart village* dengan 3 (tiga) elemen pelaksanaannya yang berada dalam satu jaringan berwarna biru dan ditemukan juga keterikatan jaringan dengan kata kunci lainnya seperti *implementation*, *pelayanan publik*, *teknologi*, *digital*, dan lainnya. Pemetaan jaringan-jaringan dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana kekuatan antar kata kunci literatur penelitian yang akan dilakukan *review* sehingga dapat menjadi landasan bagi peneliti dalam meneliti terkait implementasi program *smart village* di Indonesia (Yoraeni, 2022).

Berdasarkan pemetaan di atas, telah dilakukan penelitian-penelitian dengan fokus *smart village* dengan berbagai metode yang bertujuan untuk mengungkapkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yang membahas mengenai *smart village* di Indonesia telah

berlangsung selama lebih dari satu dekade, dengan peningkatan signifikan dalam publikasi yang dimulai sejak tahun 2017. Penelitian awal mengenai *smart village* difokuskan kepada arsitektur ramah lingkungan dan desain bangunan berkelanjutan, tetapi penelitian-penelitian berikutnya menekankan pada penerapan TIK atau teknologi (Agustiono, 2022). Pengembangan desa cerdas di Indonesia mencakup beberapa area utama yaitu tata kelola desa, ekonomi desa, lingkungan desa, sumber daya energi, sumber daya manusia, TIK, pertanian, serta pariwisata (Muhtar et.al, 2023).

Beberapa tinjauan literatur sistematis telah dilakukan untuk menganalisis penelitian yang ada tentang *smart village* di Indonesia. Melalui tinjauan tersebut telah teridentifikasi tema-tema utama seperti pengembangan aplikasi, manajemen TI/IS, dan implikasi strategi bagi masyarakat (Hadian & Susanto, 2022). Studi-studi tersebut secara kolektif memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep *smart village* di Indonesia, serta menyoroti kemajuan dan tantangan dalam implementasinya.

Namun, masih diperlukan metode penelitian yang dapat menyimpulkan solusi dari permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Salah satunya adalah metode *Scoping review*. *Scoping review* merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi literatur secara mendalam dan menyeluruh yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian dengan memetakan dan menganalisis baik secara teoritis maupun pengimplementasian program *smart village* di Indonesia agar dapat menjadi adopsi kebijakan *smart village* bagi desa-desa di Indonesia melalui *scoping review*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Apakah implementasi dari program *smart village* dapat meningkatkan pelayanan publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia melalui *scoping review*?
2. Apa saja *output* program *smart village* dalam meningkatkan pelayanan publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia melalui *scoping review*?
3. Apa saja faktor kendala serta solusi dalam meningkatkan keberhasilan implementasi program *smart village* dalam meningkatkan pelayanan publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia melalui *scoping review*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memetakan dan menganalisis bahan kajian yang sudah tersedia terkait implementasi dari program *smart village* dalam meningkatkan pelayanan publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia melalui *scoping review*.
2. Memetakan dan menganalisis bahan kajian yang sudah tersedia terkait apa saja *output* program *smart village* dalam meningkatkan pelayanan publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia melalui *scoping review*.
3. Memetakan dan menganalisis bahan kajian yang sudah tersedia terkait apa saja faktor kendala serta solusi dalam meningkatkan keberhasilan implementasi program *smart village* dalam meningkatkan pelayanan publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia melalui *scoping review*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian bermanfaat secara teoritis dalam merealisasikan ilmu dan teori yang di dapat selama perkuliahan dan bagi pembaca sebagai referensi dalam memberikan gambaran umum terkait implementasi program *smart village* dalam meningkatkan pelayanan publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia melalui *scoping review*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai aturan atau peraturan. Menurut Anderson kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok sebagai solusi dari suatu permasalahan. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan umum atau publik, maka dibutuhkan suatu penyelesaian masalah dengan cara memformulasikan suatu kebijakan yang kemudian disusun dan disepakati oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan menjadi sebuah kebijakan publik (Muadi, 2016). Administrasi negara sangat berkaitan dengan kebijakan publik ini, pemerintah sebagai aktor kebijakan yang mengatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penerapan berbagai kebijakan publik (Sore, 2017).

Menurut Dye kebijakan publik dianggap tidak hanya sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah saja tetapi juga tindakan yang tidak dilakukan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Begitu juga apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan tindakan, hal tersebut juga merupakan kebijakan publik karena ada tujuannya (Handoyo, 2012). Tindakan pemerintah tersebut merupakan suatu tujuan kebijakan publik yang legal dan sah karena memiliki legitimasi yang dibuat oleh lembaga pemerintah (Anggara, 2014). Kebijakan publik dapat dimaknai sebagai proses

interaksi negara dengan rakyat. Suatu kebijakan mencakup keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya dan bagaimana pemerintah dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan terkait dengan pembangunan desa di Indonesia (Suryono, 2014).

2.1.2. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Berikut adalah beberapa tahapan kebijakan publik menurut Dunn (2003) :

a. Penyusunan Agenda

Proses paling awal dalam kebijakan publik adalah penyusunan agenda. Proses ini memungkinkan pemahaman tentang masalah publik dan prioritas apa yang harus dimasukkan ke dalam agenda publik. Tahap ini sangat penting untuk menentukan apakah masalah publik dapat dimasukkan ke dalam agenda pemerintah.

b. Formulasi Kebijakan

Setelah tahap penyusunan agenda selesai, tahap selanjutnya adalah diskusi dengan para pembuat kebijakan tentang masalah yang telah dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini, berbagai alternatif kebijakan ditawarkan, dan yang terbaik dari alternatif-alternatif ini dipilih untuk menyelesaikan masalah.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan dari tahapan adopsi dan legitimasi kebijakan adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Setelah kebijakan dilegitimasi, alternatif kebijakan yang dibuat dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus di antara lembaga, atau keputusan pengadilan menjadi sah untuk diterapkan.

d. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah fase di mana berbagai bagian administrasi pemerintah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dan disetujui.

e. **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2014) implementasi kebijakan dapat diartikan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat, pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Menurut Silalahi (dalam Subianto, 2020) ada tiga aktivitas utama yang dilakukan selama proses implementasi:

- a. Interpretasi, yang berarti menerjemahkan makna program ke dalam peraturan yang diterima dan dilaksanakan;
- b. Organisasi, yang berarti unit yang menempatkan program ke dalam dampak;
- c. Aplikasi, yang berarti perlengkapan dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan program.

Pendekatan implementasi memiliki berbagai macam model yang dikemukakan oleh berbagai ahli. Berikut ini beberapa pendekatan implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

1. Pendekatan Implementasi Edward III

Menurut Edward III (Abdoellah dan Rusfiana, 2016), implementasi kebijakan adalah bagian yang sangat penting dari proses tersebut karena jika suatu kebijakan atau program tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang menjadi sasaran pembuatan kebijakan, maka kebijakan atau program tersebut kemungkinan besar akan mengalami kegagalan meskipun telah diimplementasikan dengan baik. Selain itu, jika kebijakan atau program tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengurangi

masalah yang menjadi sasaran pembuatan kebijakan, kebijakan atau program. Oleh karena itu, Edward III memperkenalkan model pendekatan implementasi yang melibatkan empat komponen keberhasilan implementasi:

a) Komunikasi

Transmisi, konsistensi, dan kejelasan adalah tiga komponen penting dari komunikasi kebijakan. Tentu saja, hal-hal yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan adalah para pelaksana kebijakan harus tahu apa yang mereka lakukan saat mengimplementasikan suatu kebijakan. Karena itu, penting untuk berkomunikasi dengan baik agar para pelaksana kebijakan tidak bingung saat mengimplementasikan suatu kebijakan.

b) Sumber-sumber

Sumber-sumber sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan program tidak akan berhasil tanpa sumber yang memadai. Sumber-sumber penting ini termasuk staf, informasi, dan wewenang. Staf adalah sumber yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan; keberhasilan pelaksanaan kebijakan bergantung pada keterampilan dan keahlian staf. Selain itu, sumber informasi sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Sumber informasi ini terdiri dari informasi tentang metode pelaksanaan kebijakan dan data tentang kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap undang-undang pemerintah. Wewenang juga memainkan peran penting dalam penerapan kebijakan. Wewenang ini berbeda-beda tergantung pada program yang digunakan.

c) Sikap Pelaksana

Kecenderungan para pelaksana kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan, kebijakan yang dilaksanakan akan mendapatkan dukungan dan

kemungkinan besar para pelaksana kebijakan akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana pembuat kebijakan. Namun, jika sikap pelaksana kebijakan berbeda dari apa yang mereka pikirkan akan membuat pelaksanaan kebijakan sulit untuk diimplementasikan.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan atau program. Struktur birokrasi merupakan elemen penting dalam mengkaji implementasi kebijakan. Pastinya prosedur operasional standar diperlukan untuk membantu implementor menjalankan kebijakan agar berjalan dengan baik.

2. Pendekatan David L. Weimer & Aidan R. Vining

Terdapat tiga kelompok besar faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi program atau kebijakan yang diutarakan oleh Weiner & Aidan (dalam Suharno, 2013):

a) Logika Kebijakan

Logika yang dimaksud di sini adalah bahwa kebijakan harus masuk akal (*reasonable*) dan didukung secara teoritis.

b) Lingkungan

Lingkungan di mana kebijakan diterapkan akan mempengaruhi pengimplementasian kebijakan atau program. Meskipun suatu kebijakan atau program berhasil diterapkan dalam lingkungan tertentu, hal ini tidak menjamin bahwa program tersebut akan berhasil dengan cara yang sama di lingkungan lain. Kondisi lingkungan di mana kebijakan diterapkan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi.

c) Kemampuan Implementor Kebijakan

Kemampuan dan keterampilan implementor kebijakan tentu akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Kemampuan dan keterampilan implementor dalam menerapkan suatu kebijakan atau program

terkait langsung dengan kemungkinan keberhasilan kebijakan atau program tersebut.

3. Pendekatan Implementasi Merilee S. Grindle

Menurut Grindle (Anggara, 2014) implementasi kebijakan bergantung pada isi dan konteks kebijakan tersebut. Berikut adalah penjelasan Grindle tentang isi dan konteks kebijakan yaitu:

a) *Content of Policy* (isi kebijakan)

Isi program atau kebijakan akan memengaruhi tingkat keberhasilan implementasinya. Grindle menyebutkan beberapa jenis isi kebijakan yang dapat memengaruhi implementasi, antara lain:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh program

Jika suatu kebijakan atau program tidak merugikan salah satu pihak, maka implementasi kebijakan atau program tersebut akan lebih mudah karena pihak kepentingan yang dirugikan tidak akan menentangnya.

2. Jenis manfaat yang akan diperoleh

Untuk mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat, implementasi kebijakan atau program harus memberikan manfaat bagi orang banyak.

3. Jangkauan perubahan yang diinginkan

Semakin besar dan luas perubahan yang diinginkan, semakin sulit kebijakan diimplementasikan karena proses mencapainya akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

4. Kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan publik

Semakin banyak posisi pengambil keputusan dalam kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisasi, semakin sulit untuk menerapkan kebijakan atau program.

5. Pelaksanaan program

Keberhasilan implementasi kebijakan akan meningkat jika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan.

6. Sumber daya yang tersedia

Sumber daya yang memadai diperlukan selama proses pelaksanaan kebijakan atau program. Adanya sumber daya akan mempermudah pelaksanaan kebijakan atau program. Sumber daya ini dapat berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan prasarana.

b) *Context of implementation* (konteks implementasi)

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh konteks dan isi kebijakan. Menurut Grindle, berikut adalah beberapa konteks implementasi yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan atau program:

1. Kekuatan, keuntungan, dan motivasi aktor yang terlibat

Jika kekuasaan politik merasa terlibat dalam implementasi kebijakan atau program, mereka akan membuat strategi untuk memenangkan persaingan dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati hasilnya. Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan atau program.

2. Ciri-ciri lembaga penguasa

Bagi yang kepentingannya terpengaruh, pelaksanaan kebijakan atau program dapat menyebabkan konflik. Secara tidak langsung, strategi penyelesaian konflik seperti "siapa mendapatkan apa" dapat menunjukkan bagaimana lembaga atau penguasa bertindak sebagai implementor.

2.2. Tinjauan Tentang *Smart village*

2.2.1. Konsep *Smart village*

Menurut Wiswanadham konsep *smart village* merupakan sebuah layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan aktivitas desa yang dikelola oleh masyarakat desa secara efektif dan efisien (Afifah, 2021). *Smart village* merupakan pengembangan konsep pada masyarakat desa yang berada dalam suatu komunitas yang mengatasi permasalahan wilayah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki dengan pemanfaatan teknologi informasi secara cerdas dan efisien yang berbasis kearifan lokal serta norma-norma setempat (Baru dkk., 2019).

Selaras dengan pernyataan tersebut, konsep pengembangan *smart village* ini tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi pada suatu desa, namun juga pada perubahan keadaan desa menjadi lebih baik dan sejahtera dengan memaksimalkan pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan (Prabowo, 2023).

Konsep *smart village* mengadopsi dari perkembangan konsep *smart city*, dikarenakan desa sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan juga memerlukan pembaharuan ataupun adopsi terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga akan mendorong percepatan pengembangan *smart city*. (Herdiana, et.al, 2019). Apabila dilihat dalam konteks karakter pembangunan, desa merupakan kesatuan unit dari suatu kelompok masyarakat yang memiliki karakter dan tradisi yang khas, masyarakatnya menjadi bagian penggerak utama pembangunan sehingga desa digambarkan sebagai kesatuan masyarakat hukum (Herdiana, 2019). Program *smart village* mempunyai enam pilar sebagai berikut:

- a. Warga Cerdas (*Smart people*);
- b. Mobilitas Cerdas (*Smart Mobility*);
- c. Ekonomi Cerdas (*Smart Economic*);
- d. Pemerintahan Cerdas (*Smart government*);
- e. Pola Hidup Cerdas (*Smart Living*); dan
- f. Lingkungan Cerdas (*Smart environment*).

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang homogen tidak bisa disamakan dengan kota dalam adopsi teknologi informasi. Konsep *smart city* tidak bisa diterapkan di desa karena homogenitas masyarakatnya yang mempunyai karakteristik kearifan lokal tersendiri. Perlu ada upaya konstruksi konseptual yang didasarkan kepada karakteristik desa. Maka daripada itu, perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi di desa ditujukan untuk penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan, kelestarian tatanan sosial dan struktur masyarakat perdesaan. Perlu adanya juga suatu konstruksi konseptual yang mendasar pada karakteristik wilayah desa dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desa mampu menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dengan mendasar pada nilai, karakter dan norma yang dimiliki desa (Herdiana, 2019).

2.2.2. Dimensi *Smart Village*

Konsep *smart village* dipahami oleh para ahli sebagai integrasi teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat perdesaan, sehingga menghasilkan kemanfaatan dan kesinambungan antara teknologi informasi dengan masyarakat perdesaan. Meskipun demikian, secara konseptual terdapat beberapa perbedaan dimensi *smart village* yang diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut:

Tabel 2. Dimensi *Smart village* Menurut Para Ahli

Pendapat Ahli	Dimensi
Chatterje & Kar (2017)	Sumber Daya, Institusi, Layanan Publik, Keberlanjutan
Srikanta & Patnaik, (2020)	Keberlanjutan, Teknologi, Institusi, Sumber Daya
Susy & Andari, (2018)	Institusi, Rantai Layanan, Teknologi, Sumber Daya
Novi & Ella (2019)	Sumber Daya, Teknologi, Rantai Layanan, Institusi

(Sumber: *Muzaqi & Tyasotyningarum, 2022*)

Pada tabel di atas terlihat bahwa para ahli dari hasil penelitiannya menyematkan dimensi sumber daya, institusi, dan teknologi menjadi dimensi yang mendasar bagi tercapainya pengembangan *smart village*, sementara layanan digital, rantai layanan dan keberlanjutan menjadi pembeda. Kesamaan beberapa konsep tersebut didasarkan kepada pemahaman bahwa dalam menerapkan teknologi diperlukan adanya kemampuan dari institusi sebagai struktur tertinggi dalam memberikan dukungan kapasitas sumber daya. Institusi sebagai lembaga formal pada struktur pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintah desa memiliki kewenangan penuh dalam membangun metode pengembangan kebijakan program *smart village*.

2.2.3. Elemen *Smart village*

Desa yang memiliki karakteristik budaya dan masyarakat yang homogen menjadi alasan bahwa pengembangan wilayah desa tidak dapat disamakan dengan lingkup pengembangan kota dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Perlu adanya suatu konstruksi konseptual yang mendasar pada karakteristik wilayah desa dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga desa mampu menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dengan mendasar pada nilai, karakter dan norma yang dimiliki desa.

Pengembangan *smart village* memiliki dimensi yang lebih sesuai dengan kondisi pedesaan, yaitu pemerintah, masyarakat, ekonomi dan lingkungan yang smart. Setiap variabel tersebut memiliki beberapa indikator dan parameter pengukuran ketercapaiannya.

Pengembangan atau konstruksi *smart village* didasarkan pada 3 (tiga) elemen pokok yang terdiri dari *smart government*, *smart community* dan *smart environment*. Elemen pembentuk *smart village* yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan lingkungan pedesaan memiliki peran dan fungsi berbeda. Namun, elemen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan merupakan dasar atau cara untuk mencapai tujuan dari pengembangan *smart village* (Herdiana, 2019).

1. *Smart Government*

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah merupakan bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah desa berada di lingkup terendah pada struktur organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam konsep *smart village* pada pemerintahan desa dapat memudahkan proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa serta dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga penyelenggaraan fungsi pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan transparan. Indikator yang termasuk ke dalam *smart government*, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, ketersediaan layanan publik dan sosial serta transparansi tata kelola.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan koordinasi kepada masyarakat termasuk pada kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ketersediaan layanan publik dan sosial diartikan sebagai ketersediaan pelayanan publik dan pengelola pengaduan masyarakat

yang di berikan pemerintah secara online. Tujuan implementasi *smart government* adalah sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. *Smart government* identik dengan adanya penerapan *e-government* atau pengelolaan pemerintah berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem pemerintahannya guna mewujudkan transparansi pemerintahan desa, pelayanan desa berbasis elektronik, dan pemanfaatan sosial media dalam menyampaikan informasi kepada publik dan memudahkan aspirasi masyarakat.

2. *Smart Community*

Masyarakat merupakan tokoh utama dalam perumusan kebijakan dan pembangunan desa serta bukan hanya sebagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Masyarakat pedesaan dituntut aktif dalam proses pengembangan desa untuk dapat merasakan manfaat dari adanya suatu program pemerintah. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi perlu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai suatu peluang dalam pengoptimalan peran serta kontribusi dalam pengembangan desa (Herdiana, 2019). Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa di mana masyarakat harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga berkontribusi baik dalam pengembangan desa. *Smart community* merupakan sebuah komunitas di mana anggota dari pemerintah daerah, pebisnis, pendidikan, lembaga maupun masyarakat umum memahami potensi teknologi informasi, dan membentuk suatu komunitas sukses untuk bekerja sama dalam menggunakan teknologi dan mengubah komunitas mereka dengan cara positif dan signifikan.

3. *Smart Environment*

Pedesaan memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing yang sangat berkaitan dengan lingkungan pedesaan. Pada konsep *smart village*, suatu lingkungan berorientasi pada lingkungan tatanan sosial dan alam. Tatanan sosial pada lingkungan pedesaan terdiri dari nilai adat dan budaya, sedangkan pada tatanan alam terdiri dari pengelolaan dan pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan. *Smart environment* tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan lingkungan alam yang berkelanjutan saja, tetapi juga pada pembentukan karakter desa yang mencakup tatanan sosial dari adat dan budaya desa sehingga pada pemanfaatan teknologi informasi, lingkungan dapat memperkuat nilai adat dan budaya yang dimiliki desa tersebut (Herdiana, 2019).

Ketiga elemen atau institusi tersebut harus bersinergis dengan baik dalam pelaksanaan *smart village*, yaitu *smart government* dimana pemerintah desa dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, *smart community* yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat di pedesaan dapat turut aktif dalam membantu pengembangan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan *smart environment* terkait bagaimana mengembangkan desa yang cerdas tidak hanya berfokus pada pengembangan dan pelestarian lingkungan alam saja, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola lingkungan sehingga dapat memperkuat nilai adat dan budaya desa.

2.2.4. Kebijakan Program *Smart Village*

Dasar dan pilar konsep *smart village* adalah mendukung pembangunan desa berkelanjutan dimana pemerintah dalam hal ini melalui Kemendes PDTT berfokus pada penguatan pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas dan pembangunan berbasis lokal. Dasar program *smart*

village adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sesuai dengan isi Pasal 78 UU Desa yaitu:

- a. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- b. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; dan
- c. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

UU Desa juga mengamanatkan agar pemerintah daerah mendorong dan menyediakan perangkat jaringan informasi yang dapat meningkatkan pembangunan di desa, sesuai Pasal 86 yaitu:

- a. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia;
- d. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan;

- e. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan; dan
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk desa.

Maka dari hal tersebut, dibuatlah program *smart village* guna membangun desa yang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Pelatihan kader-kader digital desa, pembangunan jaringan desa cerdas Indonesia, dan pembentukan desa percontohan (*pilot project*) merupakan wujud dari implementasi program *smart village*. Dimulai pada tahun 2021 pada tahap konsolidasi sumber daya manusia dan pada tahun 2022 dibentuk desa percontohan di Sulawesi Tengah dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/ MoU*) ditekan antara Kemendes PDTT dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Program *smart village* bertujuan membuat kesetaraan antar wilayah kota dan desa.

Target Kemendes PDTT terhadap program *smart village* adalah mencetak tiga ribu desa cerdas di tahun 2024, untuk itu Kemendes PDTT bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai fasilitator dan bantuan dari penyedia jasa telekomunikasi (Kemendes PDTT, 2021).

2.3. Peranan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik

Peran teknologi informasi sangat penting bagi pemerintah. Teknologi informasi tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan kualitas informasi, tetapi juga berperan sebagai alat dan strategi yang ampuh untuk mengintegrasikan dan memproses data dengan cepat dan akurat serta mengembangkan produk layanan kepada masyarakat.

E-government adalah bentuk pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada warganya untuk

keperluan administrasi dan urusan pemerintahan lainnya (Syamsudin, 2023). Layanan ini disediakan pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan internet. Oleh karena itu, perlu dikembangkan serangkaian jenis layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan izin secara sukarela, memantau proses pembayaran, melakukan pembayaran langsung untuk setiap izin dan memungkinkan masyarakat berperan aktif.

Dengan adanya fasilitas seperti ini, masyarakat diharapkan akan menjadi lebih produktif karena masyarakat tidak perlu antri dalam waktu yang lama hanya untuk menyelesaikan satu buah perizinan. Dengan adanya sistem berbasis *online*, masyarakat dapat memanfaatkan banyak waktunya untuk melakukan pembangunan yang lain sehingga diharapkan produktivitas nasional pun dapat meningkat (Syamsudin, 2023). Menurut Seifert dan Bonham (dalam Syamsudin, 2023) ada empat tipe penerapan *E-government* sebagai berikut :

1. *Government to Citizens*

Jenis *G-to-C* ini merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, dimana pemerintah membangun dan mengimplementasikan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama meningkatkan interaksi dengan komunitas (*people*). Dengan kata lain tujuan dibuatnya aplikasi *e-government*. Tipe *G to C* bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai saluran akses dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya, Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.

2. *Government to Business*

Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung sehingga perekonomian negara dapat berfungsi dengan baik. Contoh aplikasi *e-government* tipe *G-to-B* Ketika wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan dibayarkan kepada pemerintah.

3. *Government to Government*

Di era globalisasi saat ini, setiap negara perlu berkomunikasi lebih baik. Salah satu wujud penerapan *e-government* tipe *G-to-G* adalah aplikasi yang menghubungkan pemerintah daerah dengan bank asing milik negara di negara lain tempat mereka menyimpan dan menginvestasikan dana. Di mana pengembangan sistem *database* informasi atau intelijen untuk mengidentifikasi orang-orang yang dilarang masuk atau keluar pada suatu wilayah.

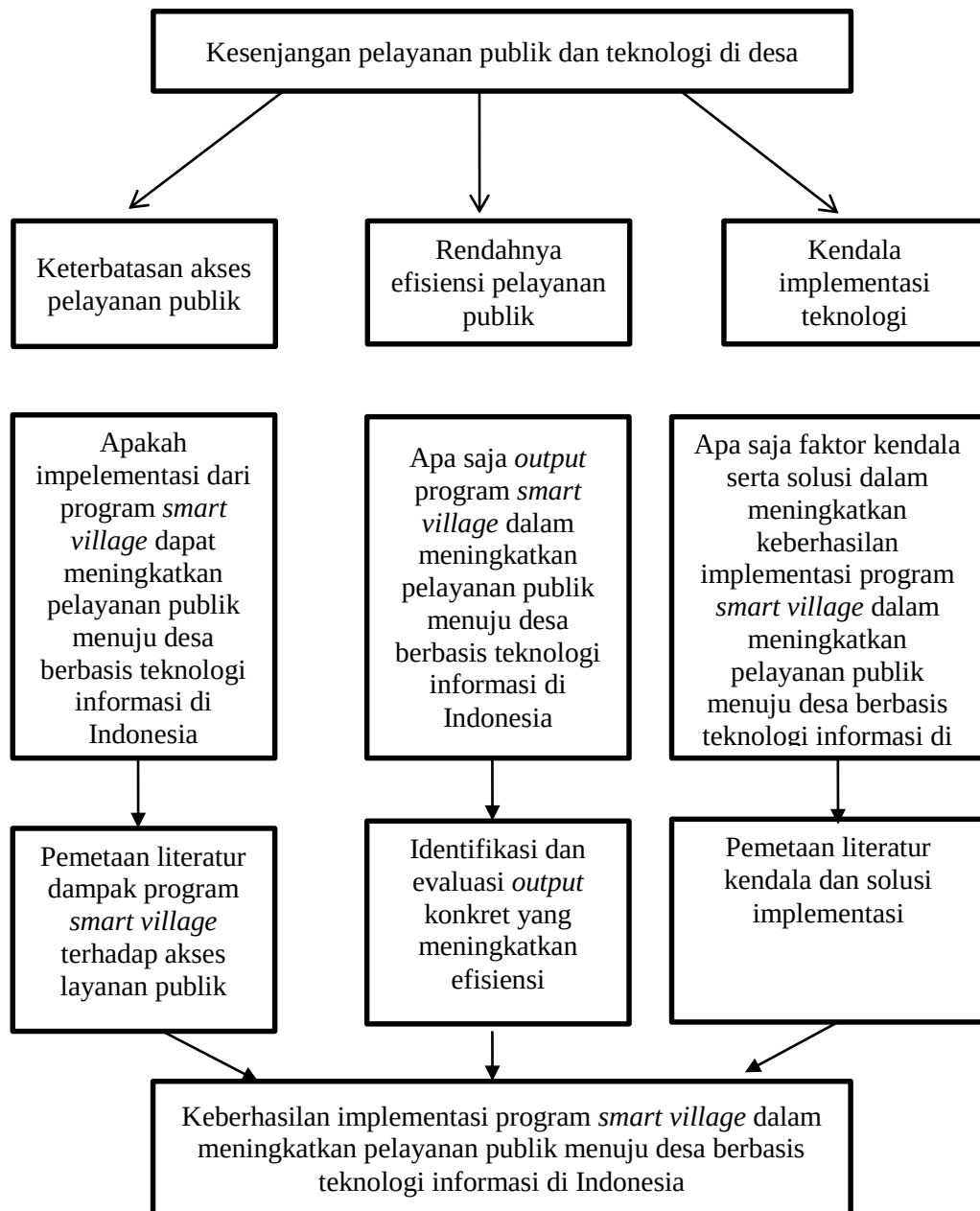
4. *Government to Employees*

Penerapan *E-government* bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil dan yang bekerja di bidang pelayanan publik di berbagai institusi. Aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format *G-to-E* seperti Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak dari pegawai hak pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak-hak individualnya.

2.4. Kerangka Pikir

Peneliti akan mengkaji pokok bahasan yang dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu; bagaimana implementasi *smart village* dalam meningkatkan pembangunan desa menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia; apa saja *output* program *smart village* dalam meningkatkan pembangunan desa menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia; apa saja faktor kendala serta solusi dalam meningkatkan keberhasilan implementasi program

smart village dalam meningkatkan pembangunan desa menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia. Secara lebih ringkas, kerangka pikirnya digambarkan dalam tabel berikut:



Gambar 4. Kerangka Pikir

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review* dengan metode *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis* atau disebut PRISMA. Metode ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi jenis bukti yang tersedia sesuai dengan topik yang didiskusikan, mencari gambaran bagaimana penelitian dilaksanakan pada topik atau bidang tertentu, untuk mengidentifikasi karakteristik atau faktor kunci yang terkait dengan suatu konsep (Munn *et al.*, 2018). Desain penelitian *scoping review* dipilih karena sumber referensi yang peneliti gunakan bervariasi berasal dari artikel jurnal dan *official websites*. Peneliti menggunakan aplikasi *Publish or perish* (PoP) dengan menggunakan kata kunci “Implementasi AND *Smart village* AND *Smart government* AND *Smart Environment* AND *Smart community* AND Layanan Publik AND Digital” untuk memetakan dan menganalisis implementasi program *smart village* dalam meningkatkan pembangunan desa berbasis lingkungan di Indonesia.

Menurut Arksey dan O'Malley, *scoping review* bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari topik penelitian yang telah ditentukan dengan menggunakan berbagai sumber artikel penelitian serupa lalu dikelompokkan dan membuat kesimpulan. Penulis akan mengkritisi hasil dari penelusuran literatur kemudian dilakukan pemilahan menggunakan tabel PICO(S) dan Diagram *flowchart* lalu hasilnya akan dianalisis sintesis dan membuat kesimpulan akhir (Tricco *et.al*, 2016).

3.2. Kriteria Kelayakan (*Eligibility Criteria*)

Kriteria kelayakan pada penelitian ini digunakan sebagai bahan kelayakan dari literatur yang akan ditelusuri sesuai dengan fokus *review* penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah. *Framework* PICO(S) (*Population, Intervention, Comparison, Outcome, and Study design*) adalah alat bantu sistematis yang digunakan untuk merumuskan pertanyaan penelitian dan menentukan kriteria kelayakan artikel-artikel yang akan digunakan dalam *scoping review*. *Framework* ini membantu peneliti dalam menyaring dan memilih literatur yang relevan. Dengan mengacu kepada elemen-elemen dalam *framework* PICO(S), peneliti dapat mengevaluasi kesesuaian setiap artikel terhadap fokus kajian secara objektif dan memastikan artikel yang disertakan dalam analisis relevan dan mendukung tujuan penelitian.

Kriteria kelayakan dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan seleksi terhadap literatur yang sesuai dengan fokus *review*, yaitu bagaimana implementasi program *smart village* dalam meningkatkan pembangunan desa menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia, apa saja *output* program *smart village* dalam meningkatkan pembangunan desa menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia, serta apa saja faktor kendala serta solusi dalam meningkatkan keberhasilan implementasi program *smart village* dalam meningkatkan pembangunan desa menuju desa berbasis teknologi informasi Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan dengan cepat konsep-konsep kunci yang mendasari penelitian dan sumber utama serta jenis bukti yang tersedia dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menyangkut konsep secara komprehensif.

3.3. Sumber Informasi dan Strategi Pencarian

3.3.1. Sumber *Literature*

Pencarian sumber literatur menggunakan *database* utama yaitu *Google scholar*. Peneliti menggunakan aplikasi pencarian *papers* yaitu *Publish or perish* yang berpusat pada penelusuran *google scholar* untuk melakukan eksplorasi data literatur dengan lebih efisien dan efektif.

3.3.2. Strategi Pencarian

Fokus pencarian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Strategi pencarian menggunakan *Framework Population, Intervention, Comparison, Outcome, and Study design* PICO(S) dalam mengelola dan memecahkan fokus *review* (Wikia, 2018).

PICO(S) digunakan untuk mempermudah dalam penelitian yang terkait dengan area penelitian, membantu dalam mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam fokus *review*, mengembangkan istilah pencarian yang sesuai untuk menggambarkan masalah, dan menentukan kriteria inklusi dan eksklusi.

- a. *Problem/Population*, masalah yang akan di analisis atau populasi.
- b. *Intervention*, tindakan yang dilakukan atau suatu pemaparan terhadap studi kasus.
- c. *Comparison*, penatalaksanaan yang digunakan sebagai pembandingan.
- d. *Outcome*, hasil atau luaran yang diperoleh pada penelitian.
- e. *Study design*, (opsional) menjadi pembatas atau digunakan selama tinjauan hasil.

Berikut *Framework* PICO(S) dalam implementasi program *smart village* dalam meningkatkan pembangunan desa menuju desa berbasis teknologi informasi Indonesi melalui *scoping review*.

Tabel 3. Framework PICO(S)

Population and Problem	Program <i>Smart Village</i>
Intervention	Elemen pelaksanaan <i>smart village</i>
Comparison	Pelayanan Publik
Outcome or Themes	Implementasi, <i>Output</i> , Kendala, Strategi
Study Design	Semua artikel yang berkaitan dengan implementasi program <i>smart village</i> terhadap peningkatan pelayanan publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024)

3.4. Seleksi Literatur

Peneliti akan melakukan pemilihan terhadap literatur yang diperoleh dari *database Google scholar* melalui pencarian dari aplikasi *Publish or perish*. Untuk menyempurnakan penyaringan literatur, peneliti membuat kriteria inklusi dan eksklusi. Literatur yang didapat akan dipilih sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian. Kriteria Inklusi merupakan penjelasan dari faktor yang dipilih untuk memasukkan artikel dalam pelaksanaan *review*. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan penjelasan faktor dari penulis untuk tidak memasukan artikel tersebut dalam pelaksanaan *review* (Zulaida, 2021).

Tabel 4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Population and Problem	Program <i>smart village</i>	Selain program <i>smart village</i>
Intervention	Elemen pelaksanaan <i>smart village</i> terkait <i>Smart environment</i> , <i>Smart government</i> dan <i>Smart community</i>	Elemen pelaksanaan <i>smart village</i> selain <i>Smart environment</i> , <i>Smart government</i> dan <i>Smart community</i>
Comparison	Pelaksanaan program <i>smart village</i> terhadap peningkatan pelayanan publik	Pelaksanaan program <i>smart village</i> selain terhadap peningkatan pelayanan publik
Outcome and Themes	Implementasi, <i>output</i> , kendala, strategi pelaksanaan <i>smart village</i>	Selain implementasi, <i>output</i> , kendala, strategi pelaksanaan <i>smart village</i>
Study Design and	<i>Original article</i> , <i>qualitative</i>	Artikel <i>review</i> , buku,

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Publication Type	<i>Research</i> dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian, berbasis Sinta 1-4	<i>eksperimental research, quantitative research and mix method</i> , artikel yang tidak berkaitan dengan judul penelitian, dan tidak berbasis Sinta 1-4
Publication years	Post. 2021-2024	Pre. 2021-2024
Language	Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris	Bahasa lainnya selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

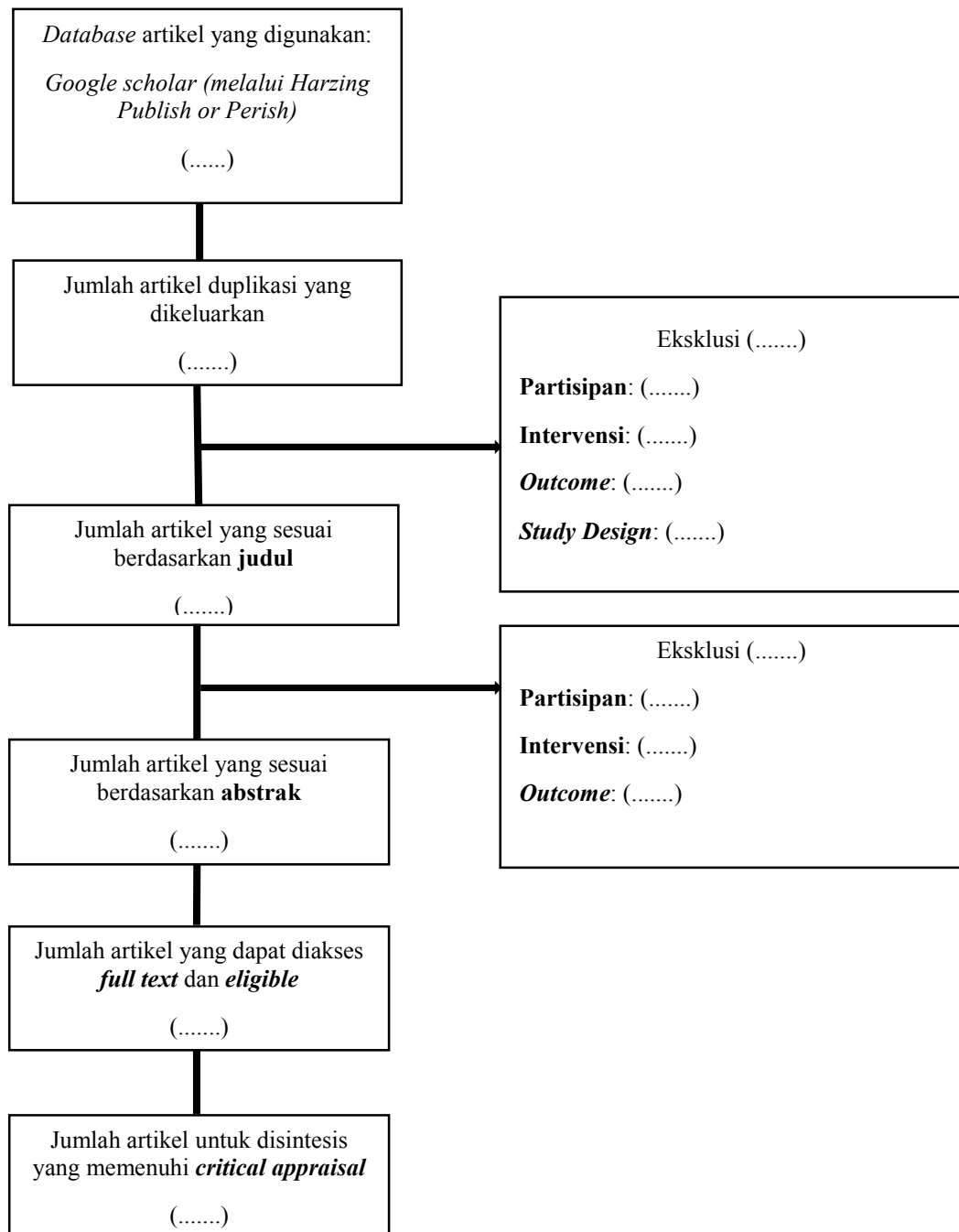
(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel kriteria inklusi dan eksklusi di atas, kriteria eksklusi terhadap artikel dengan metode penelitian eksperimental, kuantitatif, maupun *mix method* dijadikan sebagai kriteria eksklusi untuk menjaga konsistensi fokus kajian dalam penelitian ini. Tujuan utama dilakukannya *scoping review* adalah untuk memetakan secara komprehensif konsep, tema, dan pendekatan yang berkembang di dalam suatu bidang, bukan untuk melakukan pengukuran yang bersifat statistik atau menguji hipotesis. Maka dari itu, artikel dengan pendekatan atau metode penelitian kualitatif dijadikan sebagai kriteria inklusi karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks, proses, serta dinamika dari implementasi program *smart village*.

Sementara itu, penetapan artikel yang bersumber dari jurnal yang terindeks SINTA 1-4 sebagai kriteria inklusi memiliki tujuan untuk menjamin kualitas dan kredibilitas dari sumber literatur yang digunakan. Pembatasan literatur pada jurnal SINTA 1-4 dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang di-*review* berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, relevan, dan mendukung keandalan temuan dalam pemetaan konsep yang dilakukan dalam penelitian ini.

Proses identifikasi literatur tersebut menggunakan PRISMA *Flowchart* untuk menggambarkan secara detail prosesnya. PRISMA merupakan *Preferred Reporting Items for Systemtic Review and Meta-Analyses*, dikembangkan untuk melaporkan seleksi literatur. PRISMA sangat tepat digunakan dalam penelitian studi literatur, karena dapat meningkatkan kualitas pelaporan hasil publikasi. Adapun *keywords* yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu

“Implementasi AND *Smart village* AND *Smart government* AND *Smart Environment* AND *Smart community* AND Layanan Publik AND Digital” dengan menggunakan *Publish or perish*. Berikut alur seleksi literatur yang akan dihimpun dalam PRISMA *Flowchart*:



Gambar 5. Diagram PRISMA *Flowchart*

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024)

3.5. Item Data dan Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis yang kemudian dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan, menguji hipotesis atau menghasilkan hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan skrining terhadap artikel teks lengkap dan disaring oleh peneliti secara independen. Formulir bagan digunakan untuk mengelola dokumentasi data yang diekstraksi dari studi yang disertakan. Formulir bagan menyertakan kriteria inklusi dan penjelasan mengapa studi dimasukkan atau dikecualikan pada tahap ini. Jika pada prosesnya ada kekeliruan atau kebingungan, peneliti berkonsultasi sampai konsensus tercapai.

Studi yang memenuhi kriteria inklusi dievaluasi kritis menggunakan desain penelitian *qualitative, critical appraisal* pada literatur yang telah dieliminasi dari kriteria inklusi. Pengkajian kualitas studi menggunakan *critical appraisal checklist for analytical cross sectional* dan *critical appraisal checklist for qualitative research* dari panduan *Joanna Briggs Institute Appraisal Tools*. Kualitas metodologi akan dinilai dengan sedang jika memenuhi kriteria 6–8 dan kriteria tinggi 9–10 dari daftar periksa *critical appraisal* (Stenberg *et al*, 2018).

3.6. Sintesis

Tahap sintesis akan dilakukan peneliti dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sintesis tersebut mencakup analisis kualitatif yakni analisis isi dari komponen tujuan penelitian. Sintesis dilakukan melalui tiga fase pendekatan yang terdiri dari menyusun, meringkas, dan melaporkan hasil. Pertama, analisis numerik deskriptif yang mencakup jumlah artikel, tahun publikasi, dan jenis studi. Kedua, kekuatan dan kelemahan pada literatur yang diidentifikasi melalui analisis tematik dari studi yang disertakan dalam laporan.

Peneliti akan melakukan sintesis *mapping* atau *scoping* menggunakan metodologi induktif seperti memetakan karakteristik asal penelitian yang terindikasi. Analisis data kualitatif dilakukan dengan memakai prinsip-prinsip analisis tematik. Analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola dalam data dan memiliki metodologi kualitatif. Untuk menjaga kualitas dan kepercayaan setiap tahap analisis data akan disajikan dalam sebuah tabel. Temuan disajikan di bawah judul tematik menggunakan tabel ringkasan yang dapat menginformasikan deskripsi poin-poin penting. Kemudian, tabel rinci disajikan berdasarkan, penulis, distribusi geografis studi, tahun publikasi, intervensi disajikan, populasi dan sampel, pengalaman yang dilaporkan, hasil dan temuan utama dan metodologi penelitian (Stenberg *et al.*, 2018).

3.7. Konsultasi

Konsultasi adalah tahap opsional dalam *scoping review*, karena itu ketelitian metodologis digunakan oleh peneliti. Konsultasi dilakukan ketika hasil awal disusun dalam bagan dan tabel dalam *scoping review*. Pemangku kepentingan dari penelitian ini ialah dosen pembimbing peneliti yang diberikan gambaran umum tentang hasil awal. Tujuan konsultasi adalah untuk meningkatkan validitas hasil studi.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil *review* mengenai implementasi program *smart village* dalam meningkatkan pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program *smart village* di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Model *smart village* yang diterapkan di berbagai desa beragam, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang menyeluruh. Beberapa daerah menerapkan model yang terintegrasi, sementara desa lainnya masih terbatas pada digitalisasi layanan dasar. Kemudian, dalam implementasi *smart village* terdapat aktor pelaksana yang melibatkan pemerintah desa dan kabupaten/kota, masyarakat, dan mitra seperti sektor swasta dan akademisi. Kolaborasi lintas sektor (*penta helix*) menjadi kunci keberhasilan meski implementasinya di semua wilayah belum merata.

Pada aspek komunikasi, implementasi program *smart village* berlangsung melalui media daring, forum warga, sampai dengan WhatsApp. Tetapi, sosialisasi masih minim di beberapa daerah sehingga menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal oleh masyarakat. Berikutnya, ketersediaan infrastruktur digital dan kapasitas SDM menjadi pengaruh keberhasilan program. Desa dengan jaringan internet yang stabil dan aparatur desa yang melek teknologi memperlihatkan kemajuan yang lebih cepat dalam digitalisasi desa. Selain itu, komitmen dan inisiatif kepala desa atau pejabat lokal menentukan arah kebijakan digital desa. Kepemimpinan yang responsif, transparan, dan inovatif juga mempercepat proses adopsi teknologi di tingkat desa.

Pada aspek struktur birokrasi, struktur yang fleksibel dan partisipatif mendukung implementasi *smart village* yang adaptif dan terjadinya inovasi pelayanan publik. Hasil *review* juga menunjukkan adanya transformasi digital pada pelayanan dan penerapan *smart governance*. Digitalisasi ini memperkuat transparansi, efisiensi layanan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, tidak semua desa berada pada posisi siap untuk mewujudkan *smart village*. Tantangan utama berupa keterbatasan SDM, infrastruktur yang lemah, dan ketergantungan kepada pusat.

2. *Output* dari implementasi program *smart village* beragam. *Output* tersebut mencerminkan penerapan elemen-elemen *Smart Village* yaitu *smart government* berupa digitalisasi layanan publik dan pengembangan *website* desa; *smart economy* berupa pemberdayaan UMKM dan *digital marketing*; *smart people* berupa pelatihan literasi digital, *content creation*, dan pengembangan kapasitas masyarakat; serta *smart tourism* berupa promosi pariwisata desa di media sosial dan platform digital. Beberapa desa juga menerapkan *smart environment* dengan pendekatan ramah lingkungan dan pengelolaan wisata yang berbasis alam.
3. Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi program *smart village* dalam meningkatkan pelayanan publik di antaranya masih terdapat desa yang belum memiliki SOP dalam pelaksanaan *smart village*, akses internet yang belum memadai, pemahaman baik masyarakat maupun aparatur desa yang masih kurang mengenai program *smart village* terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan pemanfaatan teknologi yang masih belum optimal. Sementara solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu komunikasi yang efektif dalam penerapan kebijakan, memperkuat kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur teknologi, penerapan sistem informasi yang terintegrasi, serta pembuatan SOP Pelayanan.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait hasil dan temuan *review*, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai implementasi program *smart village* dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia dengan memfokuskan kajian pada aspek pelayanan publik digital (*e-services*) dan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat desa.
2. Penelitian lanjutan mengenai implementasi program *smart village* dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mengukur dampak yang lebih konkret dari implementasi program *smart village*.
3. Penelitian komparatif yang melibatkan perbandingan antarwilayah atau desa untuk melihat variasi implementasi *smart village* yang berbasis karakteristik sosial-budaya dan kesiapan infrastruktur.
4. Terdapat keterbatasan pada proses pencarian literatur menggunakan *Publish or Perish* yang dilakukan hanya dalam satu kali pencarian untuk semua artikel dalam rentang waktu 2021-2024 dengan batas maksimal 1000 artikel. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan pencarian secara terpisah berdasarkan masing-masing tahun publikasi, sehingga hasil pencarian setiap tahunnya dapat lebih optimal, mencakup lebih banyak artikel yang relevan, serta memperkaya hasil analisis dalam *scoping review*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Adli, Putri, I., Dendi, Syukerti, N., Mulyad, A. I., Eriyansyah, R. (2023). Smart village and media convergence: Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(2), 215-227. DOI: 10.33474/jp2m.v4i1.19932
- Agustiono, W. (2022). "Smart villages in Indonesia in the Light of the Literature Review," 2022 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS), Bandung, Indonesia, 2022, pp. 01-05, doi: 10.1109/ICISS55894.2022.9915061.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Ardiyasa, G. G. & Rahayu, E. (2022). Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Moderat*, 8(4), 712-728.
- Afifah, V. N. (2021). *Identifikasi Potensi Pengembangan Konsep Smart village Pada Desa Wisata Rende Kabupaten Bandung Barat* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Bandung). Itenas Repository. <https://eprints.itenas.ac.id/1508/>
- Aziiza, A. A., Sulistiyani, E., & Fitri, A. S. (2023). What is the Element of the Smart Village Model?: Domains, aspects and indicators. *INTENSIF*, 7(1), 146-160. DOI: <https://doi.org/10.29407/intensif.v7i1.18898>
- Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). Tahap Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoearth*, 4(2), 68-80.
- Bahirah, H. I. (2022). Smart village Sebagai Jawaban Desa Masa Depan. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 11(2), 23-35.

- Dewi, L. K., Junaiedi, A., Rauf, E. U. T. & Putubasai, E. (2022). Smart Village Program Implementation in Hanura Village, Teluk Pandan District, Pesawaran District, Lampung Province. *Legal Brief*, 12(5), 3052-3060. DOI: 10.35335/legal
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eldo, A. P. & Inzana, N. (2022). Peluang dan Tantangan Smart Village di Era 4.0 (Studi Analisis Desa Dukuhjati Kidul Kabupaten Tegal). *Indonesian Governance Journal*, 5(2), 84-95. <https://doi.org/10.24905/igj.5.2.2022.84-93>
- Febriyani, S. A. & Kartini, D. S. (2024). Implementasi Smart Government di Kantor Lurah Guntung, Kota Bontang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(1), 64-72. DOI: <https://10.33701/jiwbp.v14i1.39293>
- Hadian, N. & Susanto, T. D. (2022). Pengembangan Model Smart village Indonesia: Systematic Literature Review. *Journal of Information System, Graphics, Hospitality and Technology*, 4(2), 77-85. <https://doi.org/10.37823/insight.v4i2.234>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Haniyuhana, A. & Wicaksono, A. S. (2023). Analisis Pengembangan Komponen Smart Village di Desa Limpung. *JMIAP: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 28-33. DOI: <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.573>
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan konsep smart village bagi desa-desa di Indonesia (Developing the smart village concept for Indonesian villages). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 21(1), 1-16.
- Ilmi, M. R., Suryawati, D., & Indriastuti, S. (2024). Intergovernmental Relations Pattern of Smart Kampung Program in Banyuwangi. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 11(1), 136-144.
- Nuraini, H., Larasati, E., Suwitri, S., & Nugraha, H. S. (2021). Pengembangan Smart village Sebagai Upaya Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Masa Pandemi Covid-19. *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, 6(4), 862.
- Kawung, E. & Tulung, L. E. (2024). The Role of Digital Technology in Social Interaction of Manembo-Nembo Village Community, Matuari District, Bitung City. *Journal of Management and Administration Provision*, 4(2), 241-247. DOI: <https://doi.org/10.55885/jmap.v4i2.398>
- Kelvin, Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2022). Kolaborasi Model Penta Helix dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji. *Jurnal Pembangunan*

Pemberdayaan Pemerintahan, 7(2), 1-15. Doi: <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2587>

Kemendesa. (2024). *Indeks Membangun Desa*. Kemendesa.go.id. Diakses pada 8 Desember 2024 di <https://idm.kemendesa.go.id/>

Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (2021). *Pemanfaatan Aplikasi Smartdesa 247 Mendukung Peningkatan Kecerdasan, Partisipasi, Kesejahteraan dan Kerjasama Kelembagaan Warga Desa*. Kemendesa.go.id. <https://www.kemendesa.go.id/>

Kurniawati, S., & Mursyidah, L. (2023). Efektivitas sistem informasi dalam pelayanan publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 613-630.

Kusroh, L. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Good Governance. *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 28-29.

Maharani, E. N. & Kencono, D. S. (2021). Penerapan Smart Governance dalam Smart Village di Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul. *JISIP-UNJA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 5(2), 25-38.

Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP: Jurnal Review Politik*, 6(2), 195-224.

Muhtar, E. A., Abdillah, A., Widianingsih, I., & Adikancana, Q. M. (2023). Smart villages, rural development and community vulnerability in Indonesia: bibliometric analysis. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2219118>

Munn, Z., Peters, M.D.J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E., (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology*, 18, 143. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x>

Musfikar, R., Rizqina, U., & Yusran. (2022). Analisis Kesiapan Desa Menuju Smart Village Pada Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. *Jurnal Infomedia: Teknik Informatika, Multimedia & Jaringan*, 7(2), 86-88.

Muzaqi, A. H., & Tyasotyaningrum, B. (2022). Village Community Empowerment Model in Smart village Perspective (Study on Village Communities in Jombang Regency). *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 10(1), 42-53.

Ningsih, E. W., Febriyanti, D. & Amaliatulwalidain. (2024). Pengembangan Smart Village Melalui Program Pemasangan Wifi di Desa Sumber Mukti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwangi. *Edunomika*, 8(4), 1-17.

- Pertiwi, A. E. & Susanti, E. (2024). Digital Readiness in The Digitalization of Public Service in Mekarsari Village, Selaawi Sub-District, Garut District. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 21(1), 58-68.
- Prabowo, M. K. (2023). Pengembangan Smart village Desa Jatibarang Berbasis Aplikasi Digital Untuk Layanan Masyarakat Yang Optimal. *Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 11-25.
- Puspitasari, M., Irianto, J., Asmorowati, S., & Aulia, M. (2023). Innovation in Sugihwaras Village, Sidoarjo District as A Smart Government Policy. *Jurnal Public Policy*, 9(2), 111-116. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.5940>
- Putri, A., Rahayu, D. & Dwisnu, E. (2024). Smart Village Program: Challenges of Implementation in Digitalization Era. *Jurnal Governansi*, 10(1), 41-54.
- Rachmawati, R. (2018). Pengembangan Smart Village untuk Penguatan Smart City dan Smart Regency. *Jurnal Sistem Cerdas*, 1(2), 12-18.
- Rukmawati, D. & Pradnyana, I. P. H. (2024). The Dynamics of Digital Transformation in Celuk Village: Opportunities, Challenges, and Readiness. *Journal of Governance and Local Politics*, 6(2), 204-215.
- Safi'i, S. (2024). Penggunaan Aplikasi Smart Village Literasia Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Administrasi di Nagasai Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. *Journal of Multidiciplinary Research and Development*, 7(1), 220-228. DOI: <https://doi.org/10.38035/rtrj.v7i1>
- Sahuddin, Zulkieflimansyah, & Yamin, A. (2024). Implementasi Pengembangan Smart Desa yang Ramah Lingkungan di Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 12258-12266.
- Saleh, C., Ibad, S., Mindarty, L. I., & Hariyono, B. S. (2023). Public Service Innovation Process of Smart Kampung Program at Banyuwangi. *Jurnal Studi Komunikasi*, 7(1), 229-248. doi: 10.25139/jsk.v7i1.5854
- Santoso, A. D., Fathin, C. A., Effendi, K. C., Novianto, A., Sumiar, H. R., Angendari, D. A. D., & Putri, B. P. (2019). *Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Evolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Center for Digital Society.
- Sella, D. & Machdum, S. V. (2024). Implementation of the Smart Village Policy to Enhance Public Services in Srimulyo Village, Piyungan Sub-district, Bantul Regency, Yogyakarta Special Region. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 4(3), 891-912.
- Sore, U. B. & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.

- Subianto. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sukri, S., Valzon, M., Salamun, S., Yazid, M., Kenepri, K., & Juariah, S. (2022). Edukasi Teknologi Informasi Dalam Konsep Smart Village di Desa Sei Lembu Makmur Kabupaten Kampar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 5(3), 155-164.
- Sulistiyowati, F. Tyas, H. S., Dibyorini, MC. C. R., & Puspitasari, C. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart Village di Kalurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta. *Jurnal IPTEK-KOM*, 23(1), 213-226. DOI: <http://dx.doi.org/10.33169/iptekkom.23.2.2021.213-226>
- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102.
- Stenberg M, Mangrio E, & Bengtsson M. (2018) Formative peer assessment in health care education programmes: protocol for a scoping review. *BMJ Open*, 8(9), e022882. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022882>
- Syamsuddin, M., Achmad, F. Y. N., & Lawelai, H. (2023). Kesiapan Dinas Pariwisata Dalam Mengelola Smart Tourism Pengembangan Wisata Di Kota Baubau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(2), 339-350.
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K., Colquhoun, H., Kastner, M., & Straus, S. E. (2016). A scoping review on the conduct and reporting of scoping reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 16(1), 1-10.
- Ummah, A., Maryam, S. & Wahidin, D. T. S. (2022). E-Government Implementation to Support Digital Village in Indonesia: Evidence from Cianjur Village, Bogor Regency. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 6(2), 245-259.
- Usmanto, B., Immawan, R., Fauzi, Sari, K. P., & Mahdi, M. I. (2018). Implementasi Web Mobile Sebagai Media Informasi Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pirngadi. *Jurnal Keteknikan Dan Sains*, 1(1), 32-40.
- Wargadinata, E. L. (2021). Hubungan dan Peran Pemangku Kepentingan Program Smart Kmapung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 47-64. DOI: <https://10.3370/jiwbp.v11i1.1449>
- Widiyarta, A., Haniyuhana, A., & Bataha, K. (2024). Transformasi Sosial Budaya Masyarakat pada Implementasi Program Smart Village dalam Perspektif Smart Governance. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 20230-2041. DOI: 10.47476/reslaj.v6i4.1903

- Wikia, H. P. (2018). *FRAMEWORKS*. Morgan Library : Corolado State Universty
- Yanti, D., Sibarani, R., Purwoko, A. & Emrizal. (2022). The Implementation of Smart Village in the Development of Denai Lama Tourism Village, Deli Serdang. *Jurnal Ekonomi*, 11(3), 1599-1607.
- Yoraeni, A., Basri, H., & Puspasari, A. (2022). Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Mewujudkan Smart village. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5).
- Yuliani, E. & Karmila, M. (2024) Initiation of Smart Village Development in Lerep Tourism Village. *Journal of Advanced Civil and Environmental Engineering*, 7(1), 91-97. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jacee.7.1.91-97>
- Zulaida, I. P. (2021). *Literature Review Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Asi Eksklusif Selama Pandemi Covid-19* (Skripsi, Stikes Insan Cendekia Medika Jombang).